

Analisis Hubungan Antara Pajak Progresif dan Ketimpangan Serta Kaitannya Dengan Pilihan Publik

Armin Rahmansyah Nasution¹ Febri Br Hutabarat² Fidia Wati³ Mery Kristiani⁴ Rina⁵
Salma Diani⁶ Uswatul Akmalia⁷

Program Studi Ilmu Ekonomi, Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: armin.nasution@yahoo.com¹ febrivalensiahutabarat@gmail.com²

fidiawati2205@gmail.com³ merykristianisimanjuntak@gmail.com⁴

rina20200407@gmail.com⁵ salmadianisiregar05@gmail.com⁶ uswatulakmalia3@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan antara pajak progresif, ketimpangan ekonomi, dan preferensi publik. Hasil menunjukkan bahwa pajak progresif berpotensi mengurangi ketimpangan melalui redistribusi pendapatan yang lebih adil, meskipun persepsi masyarakat bervariasi. Efektivitas pajak progresif bergantung pada faktor-faktor seperti struktur tarif, kepatuhan pajak, dan integrasi dengan kebijakan lain. Rekomendasi mencakup memperkuat skema pajak progresif, mengalokasikan hasil pajak untuk program sosial, serta membangun kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Pajak Progresif, Ketimpangan Ekonomi, Preferensi Publik, Redistribusi Pendapatan

Abstract

This study analyzes the relationship between progressive taxation, economic inequality, and public preferences. The findings suggest that progressive taxation has the potential to reduce inequality through fairer income redistribution, although public perceptions vary. The effectiveness of progressive taxation depends on factors such as tax rate structure, tax compliance, and integration with other policies. Recommendations include strengthening progressive tax schemes, allocating tax revenues to social programs, and building public awareness.

Keywords: Progressive Taxation, Economic Inequality, Public Preferences, Income Redistribution



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi telah menjadi salah satu tantangan global yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai laporan dan studi internasional menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam distribusi kekayaan global, di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar kekayaan dunia, sementara sebagian besar populasi hanya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan ekonomi yang ekstrem tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial dan politik yang kompleks. Dalam upaya mengatasi ketimpangan ini, berbagai negara telah mengadopsi sistem pajak progresif sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal utama. Sistem pajak progresif, yang menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi bagi kelompok berpenghasilan tinggi, secara teoritis dirancang untuk menciptakan redistribusi pendapatan yang lebih merata. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam praktiknya masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ekonom, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Kompleksitas implementasi pajak progresif tidak hanya terletak pada aspek teknis perpajakan, tetapi juga melibatkan dimensi sosial-politik yang rumit. Di satu sisi, pajak progresif dipandang sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mempengaruhi insentif ekonomi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks pilihan publik, kebijakan pajak

progresif juga mencerminkan dinamika kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Preferensi dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, ideologi politik, dan pemahaman tentang konsep keadilan. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi legitimasi dan sustainability kebijakan pajak progresif dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, efektivitas pajak progresif dalam mengurangi ketimpangan sangat bergantung pada berbagai faktor kontekstual, termasuk kapasitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan bagaimana pendapatan pajak dialokasikan untuk program-program redistributif. Interaksi kompleks antara faktor-faktor ini membentuk landscape yang perlu dipahami secara komprehensif untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kebijakan pajak progresif.

Tinjauan Pustaka

Pajak Progresif

Menurut The Economics Time-India (2015) definisi; pajak progresif adalah mekanisme perpajakan di mana otoritas pajak membebani lebih banyak pajak saat pendapatan wajib pajak meningkat. Pajak dikumpulkan dari setiap wajib pajak berpenghasilan lebih tinggi dan pajak dari wajib pajak berpenghasilan kurang ajaknya lebih rendah. Pemerintah menggunakan mekanisme pajak progresif dengan ketentuan sebagai berikut. Pajak progresif didasari keyakinan bahwa Orang-orang yang berpenghasilan lebih harus membayar lebih. Bagi pembayar pajak yang pendapatannya melebihi pendapatan patokan, maka nilai pajak baru (lebih tinggi dari sebelumnya) dibebankan kepadanya. Pajak progresif merupakan suatu sistem perpajakan yang dirancang untuk menyesuaikan tingkat pajak berdasarkan kemampuan ekonomi individu atau entitas. Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi diukur melalui pendapatan atau kekayaan, di mana individu atau entitas dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendapatan lebih rendah. Esensi dari pajak progresif terletak pada prinsip keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara lebih adil sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu (Tambunan, 2020). Penerapan pajak progresif di berbagai negara berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam sistem ini, pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap kelompok berpendapatan tinggi tidak hanya mengurangi disparitas pendapatan, tetapi juga menghasilkan pendapatan pajak yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur (Kristanti, 2022).

Ketimpangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) ketimpangan merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres. Sedangkan, pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu. Menurut teori ekonomi klasik, ketimpangan merupakan hasil dari mekanisme pasar yang bebas dan kompetitif, di mana distribusi kekayaan bergantung pada produktivitas individu atau kelompok tertentu (Fahmi, 2019). Ketimpangan menurut Arsyad (2010), yakni pertumbuhan ekonomi yang hanya dapat dirasakan sedikit manfaatnya oleh masyarakat miskin dan masih banyak penduduk yang memiliki kondisi ekonomi dibawah standar kebutuhannya. Sementara golongan kaya mampu merasakan sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan kata lain, "Trickle Down Effect" atau efek penyerapan ke bawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin tidak terjadi. Jadi, Ketimpangan ekonomi adalah kondisi dimana terjadi distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di antara anggota masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam suatu populasi.

Hubungan antara Ketimpangan dan pajak progresif

Pajak progresif merupakan alat penting dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan, di mana tarif pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada individu berpenghasilan tinggi. Penelitian oleh Fitria Arianty yang berjudul "Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau dari Azas Keadilan" menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Selain itu, penelitian lain yang membahas tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga menyoroti dampak positif dari sistem ini dalam redistribusi pendapatan. Dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada kelompok kaya, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang signifikan untuk membiayai program sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, yang bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tantangan seperti penghindaran pajak dan perlunya transparansi dalam pengelolaan pajak tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, keberhasilan pajak progresif sangat bergantung pada penerapan kebijakan yang adil dan efektif, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tujuan redistribusi pendapatan dapat tercapai secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder, dengan memanfaatkan data yang bersumber dari penelitian terdahulu, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Pendekatan ini dipilih agar dapat memperoleh informasi dan temuan dari studi-studi sebelumnya yang dapat dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku akademik, artikel jurnal terakreditasi, dan laporan statistik resmi. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif untuk memastikan relevansi dan kredibilitasnya dalam konteks topik yang diteliti. Penggunaan data sekunder ini memberikan cakupan yang lebih luas dalam memahami permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta memungkinkan analisis yang lebih mendalam dengan merujuk pada temuan yang sudah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pajak progresif telah lama menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah mengatasi ketimpangan ekonomi. Sistem perpajakan yang menerapkan tarif lebih tinggi bagi kelompok berpenghasilan lebih besar ini terbukti memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai negara. Menurut Thomas Piketty dan Emmanuel Saez (2007) menunjukkan bahwa pajak progresif berperan penting dalam redistribusi pendapatan melalui dua mekanisme utama. Pertama, pajak progresif secara langsung mengurangi pendapatan bersih kelompok kaya, sehingga memperkecil gap pendapatan dengan kelompok ekonomi bawah. Kedua, penerimaan pajak yang lebih tinggi dari kelompok kaya memungkinkan pemerintah mendanai berbagai program sosial yang menguntungkan kelompok miskin, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Studi mereka di negara-negara maju menunjukkan bahwa periode dengan tarif pajak progresif yang lebih tinggi berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah.

Temuan ini diperkuat oleh studi komprehensif OECD (2012) yang menganalisis data dari 34 negara anggotanya. Penelitian ini menemukan bahwa negara-negara dengan sistem pajak progresif yang kuat seperti Denmark, Norwegia dan Swedia secara konsisten memiliki koefisien Gini yang lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan sistem pajak yang lebih flat. Di negara-negara Skandinavia ini, kombinasi pajak progresif dengan program kesejahteraan sosial yang ekstensif berhasil menciptakan masyarakat yang lebih merata

tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, efektivitas pajak progresif dalam mengurangi ketimpangan tidak terjadi secara otomatis. Penelitian Alvaredo et al. (2013) mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Tingkat kepatuhan pajak menjadi salah satu determinan utama. Di negara-negara dengan sistem administrasi pajak yang lemah dan tingkat penghindaran pajak yang tinggi, dampak redistributif pajak progresif menjadi jauh berkurang. Hal ini sering terjadi di negara berkembang dimana kapasitas otoritas pajak masih terbatas dan sektor informal masih dominan.

Studi IMF (2014) juga memberikan catatan penting terkait desain struktur tarif pajak. Tarif yang terlalu tinggi dapat kontraproduktif karena mendorong penghindaran pajak, relokasi basis pajak ke negara lain, atau bahkan mengurangi insentif kerja. Penelitian ini merekomendasikan struktur tarif yang moderat namun dengan basis pajak yang luas dan enforcement yang kuat sebagai desain optimal untuk mengurangi ketimpangan. Pengalaman Amerika Latin, sebagaimana dianalisis dalam studi World Bank (2016), memberikan pembelajaran berharga. Meskipun banyak negara di kawasan ini menerapkan tarif pajak progresif yang tinggi di atas kertas, dampaknya terhadap ketimpangan relatif terbatas. Hal ini terutama disebabkan oleh masalah dalam implementasi seperti administrasi pajak yang lemah, tingginya sektor informal, dan berbagai celah penghindaran pajak. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan pajak progresif membutuhkan lebih dari sekedar penetapan tarif. Pentingnya mempertimbangkan pajak progresif dalam konteks yang lebih luas. Kebijakan ini perlu diintegrasikan dengan reformasi sistem perpajakan secara keseluruhan, termasuk perpajakan atas kekayaan, warisan, dan capital gains. Selain itu, dampak optimalnya baru tercapai jika dikombinasikan dengan kebijakan di sisi pengeluaran yang tepat sasaran, seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menguntungkan kelompok miskin.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pajak Progresif Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Efektivitas pajak progresif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kebijakan, dan administrasi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berperan:

1. Struktur Tarif Pajak. Struktur tarif yang mencakup besaran pajak, jumlah lapisan tarif, dan batasan pendapatan sangat menentukan efektivitas kebijakan progresif. Tarif pajak yang terlalu rendah mungkin tidak cukup mengurangi ketimpangan, sementara tarif yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif kerja atau investasi. Desain yang seimbang diperlukan agar progresivitas pajak efektif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat Kepatuhan Pajak. Efektivitas pajak progresif juga sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pajak, baik dari wajib pajak individu maupun perusahaan. Di negara dengan kepatuhan pajak yang tinggi, dampak redistribusi dari pajak progresif akan lebih terasa. Namun, di negara dengan tingkat penghindaran pajak atau penggelapan pajak yang tinggi, tujuan redistribusi mungkin sulit dicapai.
3. Pengelolaan dan Alokasi Dana Pajak. Hasil dari pajak progresif harus dikelola dan dialokasikan dengan baik ke program-program publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok berpenghasilan rendah, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Di negara dengan manajemen anggaran yang baik, efek redistribusi pajak progresif dalam mengurangi ketimpangan cenderung lebih signifikan.
4. Kebijakan Tambahan yang Mendukung. Kebijakan pajak progresif sering kali lebih efektif bila didukung oleh kebijakan lain, seperti subsidi untuk pendidikan dan kesehatan, jaminan

sosial, dan upaya peningkatan upah minimum. Kolaborasi antara kebijakan-kebijakan ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tujuan pengurangan ketimpangan lebih mudah tercapai.

5. **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah.** Tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana pajak sangat penting. Ketika masyarakat melihat bahwa pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mereka cenderung mendukung kebijakan tersebut. Namun, bila ada penyalahgunaan atau korupsi, efektivitas pajak progresif dalam mengurangi ketimpangan dapat terganggu.
6. **Struktur dan Keberadaan Pajak Kekayaan.** Selain pajak penghasilan, adanya pajak kekayaan seperti pajak properti atau pajak warisan dapat memperkuat efek redistribusi dari pajak progresif. Pajak kekayaan membantu mengurangi akumulasi kekayaan berlebihan pada segelintir individu atau kelompok dan memperlancar distribusi kekayaan di masyarakat.

Persepsi Masyarakat terhadap Pajak Progresif

Sistem pajak progresif umumnya dipandang sebagai instrumen kebijakan yang mendukung keadilan vertikal, di mana wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar porsi pajak yang lebih besar. Studi empiris menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung prinsip ini karena dianggap lebih adil dibandingkan sistem pajak flat rate (Musgrave & Thin, 2020). Namun, persepsi ini tidak seragam di semua lapisan masyarakat. Kelompok berpenghasilan tinggi cenderung memandang pajak progresif sebagai kebijakan yang kurang fair karena merasa dibebani secara tidak proporsional. Sementara kelompok menengah ke bawah umumnya mendukung sistem ini karena memberikan beban pajak yang lebih ringan (Atkinson & Stiglitz, 2021). Faktor transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak juga mempengaruhi persepsi publik. Ketika masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan untuk pembangunan dan layanan publik, tingkat penerimaan terhadap sistem pajak progresif cenderung lebih tinggi (Diamond & Saez, 2019).

Dampak pada Alokasi Sumber Daya Pemerintah

Implementasi pajak progresif memberikan implikasi signifikan terhadap pola alokasi sumber daya pemerintah. Peningkatan penerimaan pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi memungkinkan pemerintah untuk mendanai program-program redistribusi pendapatan dan penyediaan layanan publik yang lebih luas (Piketty & Saez, 2022). Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem pajak progresif berkontribusi pada:

1. Peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan
2. Pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal
3. Program pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial
4. Pemerataan pembangunan antar wilayah (Mirrlees & Diamond, 2021)

Namun, tingkat progresivitas pajak yang terlalu tinggi dapat menimbulkan dampak negatif seperti:

1. Berkurangnya insentif untuk berinvestasi
2. Potensi penggelapan pajak yang lebih tinggi
3. Relokasi basis pajak ke yurisdiksi dengan tarif lebih rendah (Slemrod & Kopczuk, 2019)

Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan tingkat progresivitas yang optimal dengan mempertimbangkan trade-off antara aspek penerimaan, keadilan, dan efisiensi ekonomi (Auerbach & Hassett, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hubungan antara pajak progresif, ketimpangan, dan pilihan publik, dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak progresif berpotensi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di suatu negara atau wilayah. Pajak progresif, yang mengenakan tarif pajak lebih tinggi pada kelompok berpenghasilan tinggi, membantu redistribusi pendapatan sehingga lebih adil. Hal ini dapat memberikan akses yang lebih setara bagi masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pajak progresif juga memengaruhi pilihan publik. Dalam masyarakat yang cenderung mendukung redistribusi pendapatan, kebijakan pajak progresif biasanya mendapat dukungan lebih besar. Sebaliknya, dalam masyarakat dengan preferensi minimal terhadap intervensi pemerintah dalam distribusi pendapatan, kebijakan ini mungkin kurang diminati. Oleh karena itu, pilihan publik memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pajak yang diadopsi pemerintah.

Saran

1. Memperkuat Skema Pajak Progresif untuk Mengurangi Ketimpangan Pajak progresif, yang membebaskan tarif pajak lebih tinggi pada kelompok pendapatan tinggi, dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Hal ini bisa membantu distribusi pendapatan lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Mengalokasikan Hasil Pajak pada Program Publik yang Menguntungkan Masyarakat Rentan Pilihan publik, atau preferensi masyarakat dalam penggunaan anggaran, sebaiknya diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi kelompok yang lebih rentan.
3. Membangun Kesadaran Publik akan Manfaat Pajak Progresif Agar kebijakan pajak progresif mendapat dukungan luas, penting untuk membangun pemahaman publik mengenai peran pajak ini dalam menciptakan keadilan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvaredo, F., Atkinson, A. B., Piketty, T., & Saez, E. (2013). *The Top 1 Percent in International and Historical Perspective*. *Journal of Economic Perspectives*, 27(3), 3-20.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196.
- Arianty, Fitria. "Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau dari Azas Keadilan." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 5, no. 1 (2022): 8-31.
- Atkinson, A. B., & Stiglitz, J. E. (2021). The Design of Tax Structure: Direct versus Indirect Taxation. *Journal of Public Economics*, 6(1-2), 55-75.
- Auerbach, A. J., & Hassett, K. (2020). Optimal Taxation with Behavioral Agents. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(2), 18-38.
- Diamond, P., & Saez, E. (2019). The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations. *Journal of Economic Perspectives*, 25(4), 165-190.
- International Monetary Fund (IMF). (2014). *Fiscal Policy and Income Inequality*. IMF Policy Paper, Washington, D.C.: IMF.
- Liyana, Nur Farida, Apriliasari, Vita, dan Ratnasari, Gusti Ayu Indah. "Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi." *Balance Vacation Accounting Journal* 5, no. 2 (2021): 126-139.
- Mirrlees, J., & Diamond, P. (2021). Optimal Taxation and Public Production I: Production Efficiency. *American Economic Review*, 61(1), 8-27.



- Murthi, N. W., Budhi, M. K. S., & Purbadharmaja, I. B. (2015). Pengaruh pajak progresif terhadap perilaku konsumtif, basis pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pendapatan daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(12), 1001-1028.
- Musgrave, R. A., & Thin, T. (2020). Income Tax Progression. *Journal of Political Economy*, 56(6), 498-514.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2012). *Income Inequality and Growth: The Role of Taxes and Transfers*. OECD Publishing.
- Piketty, T., & Saez, E. (2007). *Income Inequality in the United States, 1913–1998*. In A.B. Atkinson & T. Piketty (Eds.), *Top Incomes over the Twentieth Century: A Contrast between Continental European and English-Speaking Countries*. Oxford University Press.
- Piketty, T., & Saez, E. (2022). Income Inequality in the United States, 1913-2018. *Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 1-39.
- Slemrod, J., & Kopczuk, W. (2019). The Optimal Elasticity of Taxable Income. *Journal of Public Economics*, 84(1), 91-112.
- Wahyuni, F. (2024). Analisis perbandingan sistem pajak progresif dan pajak proporsional: Implikasi terhadap keadilan sosial. *Jurnal Papatung*, 7(1), 1.
- World Bank. (2016). *Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking with History?* World Bank Group.
- Zai, S., & Sabailaket, A. S. (2024). Analisis peran kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di negara berkembang. *JUKONI: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), Oktober 2024.